

Perkembangan dan Tren Penelitian Pengungkapan Anti-Korupsi: Sebuah Tinjauan Literatur Empiris

Avia Tamara Shabirina^{1*}, Ibrahim Fatwa Wijaya²⁾

^{1,2)} Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret
aviatamaras@gmail.com , ibrahimfatwa@staff.uns.ac.id

*Corresponding Author

Submitted: 25 April 2026

Accepted: 2 Mei 2026

Published: 1 Juli 2026

ABSTRACT

This study employs a Systematic Literature Review (SLR) using the PRISMA framework to examine the development of anti-corruption disclosure research. A total of 45 Scopus-indexed articles published between 2015 and 2026 were systematically analyzed. The findings indicate that anti-corruption disclosure not only serves as a transparency mechanism but also functions as a strategic instrument to strengthen corporate governance, mitigate fraud and corruption risks, and enhance stakeholder trust and corporate reputation. Three main themes emerge from the review: (1) the role of disclosure in reinforcing governance mechanisms and accountability, (2) its function in mitigating fraud and corruption through increased monitoring and control, and (3) its contribution to building legitimacy and stakeholder trust. However, the review also identifies several challenges, including the use of procedural disclosure measures that do not fully capture substantive practices, methodological weaknesses related to potential bias and causality issues, and sample heterogeneity that may affect the validity of findings. Overall, this study contributes by providing a comprehensive synthesis of the literature and offering implications for future research and corporate practices oriented toward integrity and sustainability.

Keywords: Anti-corruption Disclosure, Corporate Governance, Literature Review, Research Trend

PENDAHULUAN

Di tengah krisis keuangan global saat ini, kebutuhan terhadap informasi akuntansi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin besar (Brusca et al., 2018). Menurut Hess (2009), pengungkapan informasi perusahaan memiliki beragam tujuan, antara lain untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas atas kinerja perusahaan, meningkatkan kesadaran publik sekaligus mendorong perusahaan lain agar menerapkan prinsip-prinsip yang serupa, serta berperan dalam menunjang proses pembelajaran organisasi. Selain itu, pengungkapan informasi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi (Faisal et al., 2022), tetapi juga sebagai mekanisme strategis untuk membangun reputasi (Ettxeberria & Odriozola, 2017), meningkatkan kepercayaan (Masud & Rahman, 2022), serta mendukung keberlanjutan dalam jangka panjang (Barros et al., 2022).

Investor memerlukan laporan yang bersifat naratif sebagai dasar dalam melakukan analisis perusahaan, mengingat informasi nonkeuangan relatif lebih sulit dimanipulasi dibandingkan informasi keuangan (Utami & Barokah, 2024). Perusahaan juga perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakannya mampu menghasilkan respons positif dari para pemangku kepentingan, dimana kondisi tersebut mendorong berkembangnya konsep akuntansi yang dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) (Mantiri & Eriandani, 2022), yang pada dasarnya muncul sebagai respons atas dorongan dari para pemangku kepentingan (Jaggi et al., 2021).

Pengungkapan anti-korupsi menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan (Utami & Barokah, 2024), karena dapat memberikan sinyal kepada investor dan para pemangku kepentingan lainnya mengenai keseriusan perusahaan

dalam mencegah praktik korupsi, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas (Duhio et al., 2023). Setidaknya terdapat tiga alasan utama mengapa pengungkapan yang berkaitan dengan anti-korupsi perlu dilakukan oleh perusahaan, yaitu sebagai wujud komitmen dalam memerangi korupsi (GRI, 2022), sebagai indikator perilaku etis di mata publik (Islam et al., 2018), serta sebagai informasi yang menjadi pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan investasi (Faisal et al., 2022). Pelaporan aktivitas anti-korupsi juga dapat dipandang sebagai bentuk respons perusahaan terhadap tekanan lingkungan institusional eksternal (Barkemeyer et al., 2015), kritik yang muncul (Islam et al., 2018), serta pemberitaan media yang bernada negatif (Blanc et al., 2017), oleh karena itu praktik pengungkapan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai strategi legitimasi untuk mempertahankan reputasi, membangun kembali kepercayaan publik, dan menunjukkan kesesuaian perusahaan dengan norma serta ekspektasi sosial yang berlaku.

Selama satu dekade terakhir, berbagai penelitian telah secara intensif mengkaji perkembangan praktik pengungkapan anti-korupsi (Al-okaily, 2023; Asare et al., 2021; Ayman & Alleyne, 2018; Barros et al., 2022; Blanc et al., 2017; Branco & Matos, 2016; Faisal et al., 2022; Gerged et al., 2024; Joseph et al., 2016; Previtali & Cerchiello, 2023; Sari et al., 2020; Utami & Barokah, 2024). Sejumlah penelitian telah mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi pengungkapan anti-korupsi perusahaan. Barros et al. (2022) meneliti hubungan antara koneksi politik dan praktik pengungkapan anti-korupsi. Selanjutnya, Branco dan Matos (2016), menemukan adanya hubungan positif antara keanggotaan dalam *United Nations Global Compact (UNGC)* dan praktik pengungkapan anti-korupsi. Dalam studi dengan tujuan serupa, Masud et al. (2019) mengungkapkan bahwa keberadaan ahli eksternal dalam dewan direksi berhubungan positif dengan pengungkapan korupsi perusahaan. Joseph et al. (2015), membandingkan praktik pengungkapan anti-korupsi di Malaysia dan Indonesia. Sementara itu, Sari et al. (2021) meneliti 117 perusahaan menemukan bahwa ketergantungan pada tender pemerintah dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan anti-korupsi. Terakhir, Faisal et al. (2022) menemukan bahwa ukuran perusahaan dan jenis industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan anti-korupsi.

Meskipun penelitian mengenai pengungkapan anti-korupsi terus mengalami perkembangan dalam satu dekade terakhir, literatur yang tersedia masih menunjukkan pola yang beragam. Sebagian besar studi cenderung berfokus pada aspek tertentu saja, seperti transparansi atau tata kelola perusahaan, sementara kajian yang menghubungkan *ACD* dengan perilaku perusahaan, mitigasi risiko, serta implikasinya terhadap keberlanjutan jangka panjang masih relatif terbatas. Lebih lanjut, penelitian terdahulu umumnya belum menyajikan sintesis yang sistematis terkait hubungan antara pengungkapan anti-korupsi, pencegahan *fraud*, dan kepercayaan pemangku kepentingan. Padahal, ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan berperan penting dalam membentuk kualitas tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: bagaimana pengungkapan anti-korupsi memengaruhi praktik tata kelola perusahaan, mitigasi risiko *fraud* dan korupsi, serta kepercayaan *stakeholder* dalam berbagai konteks?

Pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* dipandang sebagai metode yang relevan untuk menjawab kesenjangan tersebut. Dengan menggunakan prosedur yang terstruktur dan transparan dalam proses seleksi serta analisis literatur, *SLR* memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola temuan yang konsisten, perbedaan hasil penelitian, serta arah perkembangan kajian di masa depan. Data yang digunakan dalam tinjauan ini sepenuhnya berasal dari jurnal yang terindeks dalam basis data Scopus dengan tujuan untuk memastikan tingkat kredibilitas serta ketelitian akademik dari literatur yang dianalisis. Kriteria inklusi ditetapkan secara selektif guna menjamin bahwa seluruh sumber yang digunakan memiliki relevansi dan kualitas yang memadai. Secara khusus, hanya artikel penelitian yang ditulis dalam bahasa Inggris, telah melalui proses *peer-review*, serta dipublikasikan secara lengkap sebagai artikel jurnal ilmiah yang dimasukkan dalam tinjauan ini. Penerapan proses seleksi yang ketat dimaksudkan untuk menyaring dan mengecualikan sumber-sumber yang belum final, tidak melalui proses *peer-review*, atau tidak bersifat akademik yang dapat berpotensi mengurangi kualitas, kedalaman, serta keandalan hasil penelitian.

Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian ini berupaya mensintesis literatur akademik terkait pengungkapan anti-korupsi dalam rentang waktu 2015 hingga 2026, sehingga mampu menangkap

dinamika perkembangan awal hingga tren terkini dalam bidang ini. Analisis difokuskan pada tiga dimensi utama, yaitu peran *ACD* dalam memperkuat *good corporate governance*, efektivitasnya dalam memitigasi risiko *fraud* dan korupsi, serta dampaknya terhadap kepercayaan *stakeholder* dan reputasi perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga mengelompokkan area utama dalam literatur yang ada sebagai dasar untuk merumuskan agenda penelitian di masa mendatang.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis. Dari sisi akademis, studi ini menyatukan berbagai temuan yang sebelumnya tersebar ke dalam kerangka analisis yang lebih terstruktur. Sementara itu, dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan pelaku bisnis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengungkapan anti-korupsi. Dengan menempatkan analisis dalam konteks global sekaligus mempertimbangkan relevansinya bagi perusahaan, penelitian ini menegaskan pentingnya *ACD* sebagai instrumen strategis dalam mendorong tata kelola perusahaan yang lebih baik dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan riset pengungkapan anti-korupsi perusahaan. Pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, serta mensintesis berbagai temuan empiris yang membahas pengaruh pengungkapan anti-korupsi di perusahaan. Selain itu, proses seleksi artikel dilakukan dengan mengacu pada kerangka *Population, Intervention, Comparison, Outcome* (PICO) sebagaimana diterapkan dalam penelitian Mawliady et al. (2024). Populasi dalam penelitian ini mencakup artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks dalam basis data Scopus yang dapat diakses melalui laman resminya <https://www.scopus.com>. Artikel yang dianalisis dalam tinjauan ini dihimpun mulai tahun 2015, karena periode tersebut dianggap sebagai awal berkembangnya penelitian-penelitian pionir yang secara khusus mengkaji mengenai pengungkapan anti-korupsi (misalnya Branco dan Matos, 2015; Barkemeyer et al., 2015).

Tabel 1. Kerangka PICO

<i>Population</i>	Pengungkapan Anti-korupsi Perusahaan
<i>Intervention</i>	<i>Anti-Corruption Disclosure, Anti-Corruption Reporting, and Anti-Corruption Information</i>
<i>Comparison</i>	-
<i>Outcome</i>	1. Penentu Pengungkapan Anti-Korupsi 2. Konsekuensi Ekonomi dari Pengungkapan Anti-Korupsi

Sumber: Analisis artikel, 2026

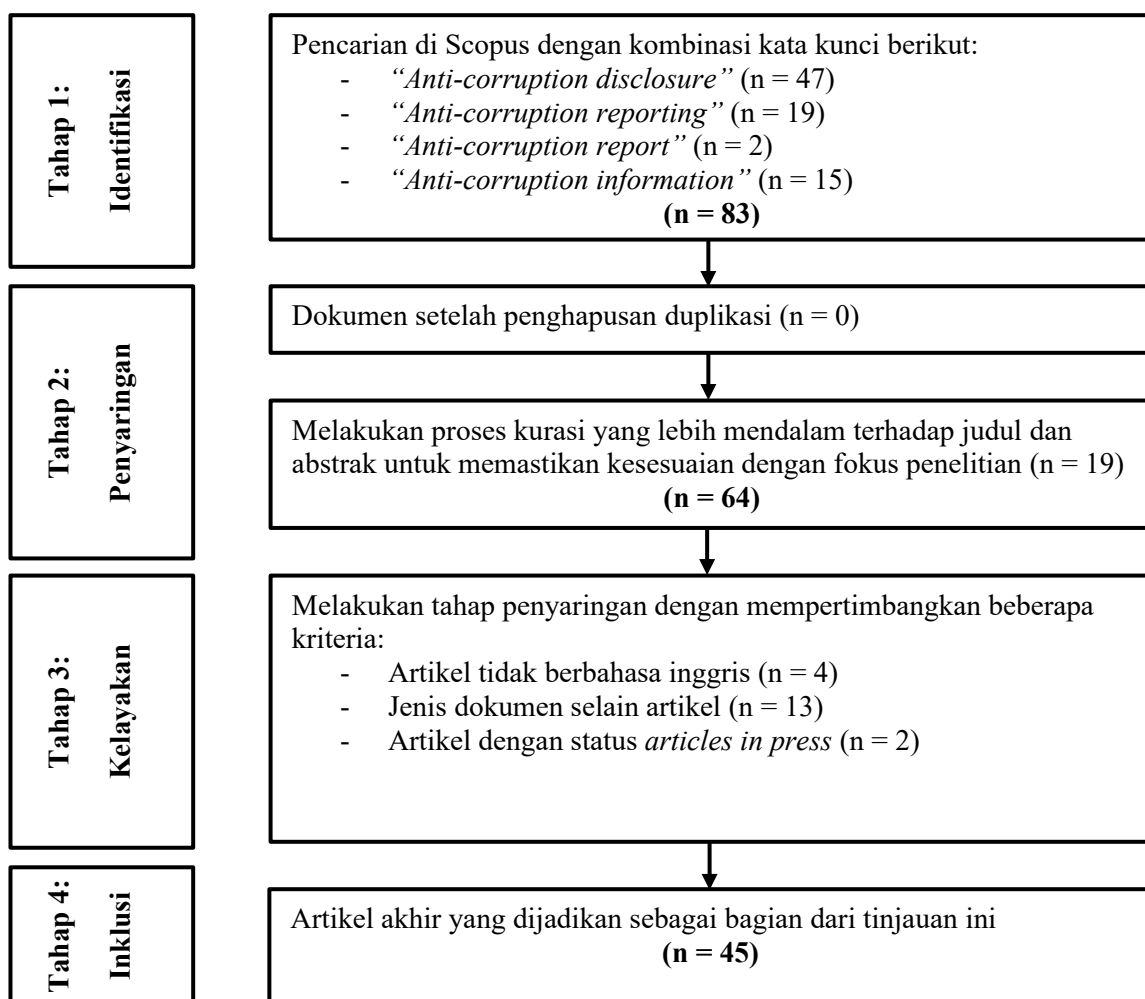
Berdasarkan kerangka PICO yang telah ditentukan, pemilihan literatur dalam tinjauan ini dilakukan dengan mengacu pada kriteria inklusi berikut:

Tabel 2. Kriteria Inklusi

Kriteria	Inklusi
<i>Subject</i>	Studi yang berfokus pada pengungkapan anti-korupsi, pelaporan anti-korupsi, atau informasi anti-korupsi
Bahasa	Bahasa Inggris
Sumber	Artikel jurnal <i>peer-reviewed</i> yang terindeks dalam basis data internasional bereputasi (misalnya, Scopus)
Jenis Artikel	Studi empiris dan konseptual yang mengkaji praktik pengungkapan anti-korupsi
Jangka Waktu	2015–2026
<i>Journal Scope</i>	<i>Management, Accounting, Business; Social Sciences; Economics, Econometrics and Finance</i>
Kata Kunci	Artikel yang mengandung istilah: “ <i>anti-corruption disclosure</i> ” OR “ <i>anti-corruption report*</i> ” OR “ <i>anti-corruption informa*</i> ”

Sumber: Analisis artikel, 2026

Berdasarkan proses pencarian awal menggunakan pendekatan PRISMA, diperoleh sebanyak 83 artikel dari database Scopus melalui kombinasi kata kunci yang telah ditentukan. Pada tahap identifikasi, tidak ditemukan adanya duplikasi dokumen, sehingga seluruh 83 artikel tersebut dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, pada tahap penyaringan awal (*screening*), dilakukan penelaahan terhadap judul dan abstrak untuk memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, sebanyak 19 artikel dieliminasi karena tidak relevan, sehingga tersisa 64 artikel yang memenuhi kriteria awal. Tahap berikutnya adalah penilaian kelayakan (*eligibility*) dengan menerapkan kriteria eksklusi yang lebih spesifik. Dalam proses ini, sebanyak 4 artikel dikeluarkan karena tidak berbahasa Inggris, 13 dokumen dieliminasi karena bukan merupakan artikel ilmiah, serta 2 artikel dikeluarkan karena masih berstatus *articles in press*. Setelah melalui seluruh tahapan seleksi tersebut, diperoleh sebanyak 45 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan selanjutnya digunakan sebagai sampel akhir dalam tinjauan literatur ini.



Gambar 1. Diagram PRISMA

Sumber: Gambar disusun oleh penulis, 2026

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pengungkapan Anti-Korupsi dalam Memperkuat *Good Corporate Governance*

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pengungkapan anti-korupsi (*anti-corruption disclosure/ACD*) merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat praktik *good corporate governance (GCG)*, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Perusahaan yang secara konsisten mengungkapkan kebijakan anti-korupsi, kode etik, program kepatuhan, serta mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) cenderung menunjukkan kualitas tata kelola yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki

tingkat pengungkapan yang rendah (Islam et al., 2021). Temuan ini sejalan dengan penelitian Ratu dan Rahajeng (2024) yang mengungkapkan bahwa pemangku kepentingan cenderung memberikan penilaian yang lebih positif terhadap perusahaan yang secara terbuka mengomunikasikan upaya anti-korupsi yang dilakukan. Sebaliknya, perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan secara memadai sering kali dipersepsikan kurang memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab.

Pengungkapan anti-korupsi selain berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan (Gerged et al., 2024), juga menjadi sarana untuk menyampaikan sinyal mengenai komitmen perusahaan dalam memerangi praktik korupsi dengan menunjukkan keseriusannya dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Duho et al., 2023). Dalam hal ini, informasi terkait kebijakan anti-korupsi memberikan gambaran kepada investor dan regulator mengenai sejauh mana perusahaan mengelola risiko etika dan kepatuhan (Faisal et al., 2022). Semakin luas dan mendalam pengungkapan yang dilakukan, semakin tinggi pula tingkat transparansi yang dihasilkan.

Dari perspektif *agency theory*, pengungkapan anti-korupsi berperan sebagai mekanisme monitoring yang dapat mengurangi potensi konflik kepentingan antara agen dan *principal* (Githaiga, 2024). Manajemen yang mengetahui bahwa kebijakan dan praktik anti-korupsi mereka diawasi secara publik akan cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berisiko tinggi terhadap integritas perusahaan (Previtali & Cerchiello, 2023). *ACD* tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen disiplin yang mendorong perilaku manajerial yang lebih etis. Selain itu, dalam kerangka *legitimacy theory*, pengungkapan anti-korupsi dipandang sebagai upaya perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial (Deegan, 2007; Faisal et al., 2022). Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas, perusahaan dituntut untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap praktik bisnis yang bersih. Pengungkapan anti-korupsi menjadi salah satu cara untuk memenuhi ekspektasi tersebut, sekaligus menjaga reputasi perusahaan di mata publik.

Sejumlah bukti empiris dari negara maju menunjukkan bahwa pengungkapan anti-korupsi berperan nyata dalam memperkuat praktik *good corporate governance* (GCG), terutama melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Studi di Italia menemukan bahwa pengungkapan anti-korupsi tidak hanya mendorong keterbukaan informasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan serta menekan risiko reputasi, tuntutan hukum, dan kerugian finansial (Previtali & Cerchiello, 2023). Perusahaan yang secara terbuka mengomunikasikan inisiatif anti-korupsi juga cenderung lebih siap menghadapi potensi krisis dan menjaga reputasi di tengah tekanan eksternal. Temuan serupa terlihat di Inggris, di mana praktik perusahaan semakin selaras dengan standar internasional seperti *United Nations Global Compact* dan *ISO 37001* terkait sistem manajemen anti-penyuapan (Ghazwani et al., 2024). Hal ini menegaskan bahwa pengungkapan anti-korupsi tidak sekadar menjadi alat transparansi, tetapi juga bagian dari strategi korporasi untuk memenuhi ekspektasi global terhadap praktik bisnis yang etis. Namun demikian, hasil yang berbeda ditemukan pada konteks negara berkembang. Beberapa studi menunjukkan adanya variasi dalam tingkat dan kualitas pengungkapan. Sebagai contoh, perusahaan di Indonesia dilaporkan mengungkapkan informasi terkait kebijakan anti-korupsi (*anti-corruption policy/ACP*) dalam tingkat yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan di Malaysia. Perbedaan ini diduga dipengaruhi oleh adanya tekanan koersif yang lebih kuat di Indonesia dalam mendorong praktik pengungkapan. Di sisi lain, berbagai kendala dalam upaya pemberantasan korupsi di Malaysia turut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pengungkapan *ACP* (Joseph et al., 2016). Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengungkapan anti-korupsi sangat dipengaruhi oleh konteks institusional dan kualitas tata kelola di masing-masing negara. Tanpa dukungan sistem kelembagaan yang kuat, pengungkapan anti-korupsi berpotensi tidak mencapai tujuan yang diharapkan dan cenderung hanya menjadi bentuk kepatuhan simbolis semata.

Lebih lanjut, efektivitas pengungkapan dalam memperkuat *GCG* juga sangat dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, seperti komitmen manajemen puncak, budaya organisasi, serta kualitas sistem pengendalian internal. Tanpa adanya integrasi antara kebijakan yang diungkapkan dan praktik yang dijalankan, pengungkapan anti-korupsi berisiko menjadi tidak efektif dalam meningkatkan kualitas tata kelola (Faisal et al., 2022). Dengan demikian, pengungkapan anti-

korupsi dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam memperkuat praktik *GCG*, meskipun tingkat efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan kondisi institusional di masing-masing negara.

Efektivitas Pengungkapan Anti-Korupsi dalam Mitigasi Risiko *Fraud* dan Korupsi

Dimensi kedua menekankan pada peran pengungkapan anti-korupsi dalam mitigasi risiko *fraud* dan korupsi sebagai bagian dari sistem manajemen risiko perusahaan. Berdasarkan hasil literatur, perusahaan dengan tingkat pengungkapan anti-korupsi yang tinggi cenderung memiliki sistem pengendalian internal yang lebih kuat, sehingga lebih mampu mencegah dan mendeteksi praktik kecurangan sejak dini. Pengungkapan anti-korupsi sering kali mencerminkan keberadaan berbagai mekanisme pengendalian, seperti audit internal, kebijakan kepatuhan, pelatihan etika, serta sistem pelaporan pelanggaran (Islam et al., 2021). Keberadaan mekanisme ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan yang sistematis dalam mengelola risiko *fraud*. Dalam konteks ini, pengungkapan berfungsi sebagai indikator eksternal atas kesiapan internal perusahaan dalam menghadapi risiko tersebut.

Dari sudut pandang manajemen risiko, *fraud* dan korupsi merupakan risiko non-keuangan yang memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan perusahaan (Hess, 2009). Risiko ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memicu sanksi hukum, kehilangan kepercayaan investor, serta kerusakan reputasi jangka panjang (Asare et al., 2021). Dalam kerangka *signaling theory*, pengungkapan anti-korupsi dapat diinterpretasikan sebagai sinyal bahwa perusahaan memiliki sistem pengendalian yang memadai dan tingkat risiko yang relatif rendah (Gerged et al., 2024). Sinyal ini menjadi penting bagi investor dalam menilai profil risiko perusahaan, khususnya dalam lingkungan bisnis yang rentan terhadap praktik korupsi. Meskipun pengungkapan anti-korupsi sering diasumsikan mampu menekan risiko korupsi, literatur menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak selalu bersifat linier. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah kasus di mana perusahaan dengan tingkat pengungkapan yang tinggi justru tetap terlibat dalam skandal korupsi. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan yang diungkapkan secara formal dengan implementasi yang terjadi di lapangan. Dengan kata lain, pengungkapan semata belum cukup efektif apabila tidak diiringi oleh sistem pengawasan yang kuat serta penegakan kebijakan yang konsisten (Faisal et al., 2022; Sari et al., 2020).

Keterbatasan tersebut juga dapat dipahami dari konteks yang lebih luas, khususnya di negara berkembang. Sari et al. (2020) menjelaskan bahwa meskipun pemerintah telah berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi, fokus kebijakan dan penegakan hukum masih cenderung diarahkan pada sektor publik, terutama pejabat negara dan aparatur sipil. Hal ini tidak terlepas dari masih tingginya kasus korupsi dan penyuapan yang melibatkan aktor-aktor pemerintah di kawasan tersebut, termasuk di negara-negara ASEAN. Akibatnya, pemerintah menghadapi keterbatasan baik dari segi waktu maupun sumber daya, sehingga tekanan terhadap sektor swasta untuk melakukan pengungkapan anti-korupsi secara konsisten belum optimal. Situasi ini diperkuat oleh temuan Faisal et al. (2022), yang menunjukkan bahwa meskipun perusahaan di Indonesia telah diwajibkan untuk melaporkan aktivitas *corporate social responsibility (CSR)*, termasuk aspek anti-korupsi, regulasi tersebut belum mampu mendorong peningkatan praktik pengungkapan secara signifikan. Dengan kata lain, kewajiban formal belum sepenuhnya diikuti oleh komitmen substantif dari perusahaan. Lebih lanjut, kondisi ini juga sejalan dengan hasil penelitian Joseph et al. (2019) yang menyoroti bahwa lingkungan institusional yang dibentuk oleh otoritas untuk menekan praktik ilegal belum diimplementasikan secara konsisten oleh organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengungkapan anti-korupsi sangat bergantung pada kekuatan sistem kelembagaan dan konsistensi penerapannya. Tanpa dukungan tersebut, pengungkapan berisiko hanya menjadi formalitas administratif yang belum mampu memberikan dampak nyata dalam menekan praktik korupsi (Joseph et al., 2016).

Dengan demikian, pengungkapan anti-korupsi memegang peran krusial dalam upaya mitigasi risiko *fraud* dan praktik korupsi. Namun, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan yang diungkapkan, melainkan juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan secara konsisten dalam praktik operasional perusahaan (Faisal et al., 2022; Joseph et al., 2016). Selain itu, efektivitasnya turut dipengaruhi oleh dukungan lingkungan

institusional yang kuat, termasuk regulasi yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang tegas. Tanpa adanya keterpaduan antara aspek kebijakan, implementasi, dan konteks institusional tersebut, pengungkapan anti-korupsi berisiko tidak memberikan dampak yang optimal dalam menekan terjadinya *fraud* dan korupsi.

Dampak Pengungkapan Anti-Korupsi terhadap Kepercayaan *Stakeholder* dan Reputasi Perusahaan

Dimensi ketiga menyoroti peran pengungkapan anti-korupsi dalam membentuk kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus memperkuat reputasi perusahaan. Keterbukaan informasi mengenai kebijakan anti-korupsi, penerapan kode etik, serta sistem pengendalian internal dipandang sebagai sinyal yang merefleksikan keseriusan perusahaan dalam menjunjung tinggi integritas dan etika bisnis (Vale & Branco, 2019). Melalui transparansi tersebut, perusahaan tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap standar tata kelola, tetapi juga membangun persepsi positif di mata *stakeholder*. Lebih dari sekadar alat komunikasi, pengungkapan anti-korupsi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk meminimalkan asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan (Ghazwani et al., 2024). Dengan tersedianya informasi yang lebih terbuka dan komprehensif, *stakeholder* dapat menilai tingkat komitmen serta kredibilitas perusahaan secara lebih objektif. Kondisi ini pada akhirnya berkontribusi dalam memperkuat kepercayaan yang menjadi fondasi penting dalam menjaga hubungan jangka panjang serta keberlanjutan reputasi perusahaan (Aldaz et al., 2015).

Sejalan dengan hal tersebut, perusahaan yang secara konsisten mengomunikasikan berbagai inisiatif anti-korupsi cenderung memperoleh penilaian yang lebih positif dari pemangku kepentingan (Ratu & Rahajeng, 2024). Tingkat keterbukaan yang tinggi tidak hanya meningkatkan kredibilitas perusahaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor, kreditor, maupun masyarakat luas. Sebaliknya, keterbatasan dalam pengungkapan sering kali menimbulkan keraguan terhadap keseriusan perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, pengungkapan yang diformalkan melalui pelaporan publik dan terintegrasi dalam rantai akuntabilitas memainkan peran penting dalam membangun legitimasi perusahaan (Deegan, 2007). Melalui transparansi tersebut, publik dan pemangku kepentingan lainnya dapat memahami komitmen serta tindakan nyata perusahaan dalam memerangi korupsi, sehingga mendorong dukungan yang berkelanjutan terhadap aktivitas dan upaya perusahaan (Sari et al., 2020). Lebih lanjut, peningkatan praktik pengungkapan juga dapat dipandang sebagai strategi legitimasi yang bersifat proaktif. Perusahaan berupaya memenuhi ekspektasi etis dengan menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan integritas. Strategi ini tidak hanya berkontribusi pada penguatan kepercayaan, tetapi juga berpotensi meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor global, sehingga mendorong masuknya aliran modal asing yang lebih besar (Haniffa & Cooke, 2005).

Pengungkapan anti-korupsi juga memiliki implikasi langsung terhadap reputasi perusahaan. Berbagai studi menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat keterbukaan yang tinggi cenderung lebih mampu menjaga citra positif serta mengelola risiko reputasi, khususnya ketika menghadapi tekanan eksternal maupun potensi krisis (Islam et al., 2018). Di Spanyol, konsistensi dalam menyampaikan informasi menciptakan persepsi bahwa perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang kuat dalam mencegah praktik korupsi, sehingga meningkatkan keyakinan *stakeholder* terhadap integritas perusahaan (Aldaz et al., 2015). Dalam perspektif yang lebih luas, perusahaan pada dasarnya berupaya menciptakan nilai, kepercayaan, dan legitimasi melalui pengelolaan hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan (Odriozola et al., 2012). Oleh karena itu, perusahaan terdorong untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak guna meminimalkan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Sebagai ilustrasi, keterbukaan perusahaan dalam mengungkapkan kinerja lingkungan (*CSR*) terbukti dapat memperbaiki komunikasi dengan pemangku kepentingan serta membangun persepsi positif terhadap komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab lingkungan. Persepsi tersebut pada akhirnya berkontribusi dalam memperkuat citra perusahaan, yang sering disebut sebagai *green goodwill* (Ortas et al., 2015).

Namun demikian, efektivitas pengungkapan dalam meningkatkan kepercayaan dan reputasi tidak selalu bersifat otomatis. Dampaknya sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang

disampaikan serta kesesuaian antara pengungkapan dan praktik yang dijalankan (Barkemeyer et al., 2015). Pengungkapan yang bersifat simbolis tanpa implementasi yang nyata berpotensi menimbulkan skeptisisme dari pemangku kepentingan, bahkan dapat memperburuk reputasi perusahaan apabila terjadi ketidaksesuaian antara informasi dan kondisi aktual (Haniffa & Cooke, 2005). Selain itu, konteks institusional turut memengaruhi bagaimana pengungkapan anti-korupsi direspons oleh *stakeholder*. Pada lingkungan dengan sistem tata kelola dan penegakan hukum yang kuat, pengungkapan cenderung lebih efektif dalam meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan. Sebaliknya, pada konteks dengan kelembagaan yang lemah, pengungkapan sering kali belum mampu memberikan dampak yang signifikan, sehingga berisiko hanya menjadi formalitas administratif. Dengan demikian, pengungkapan anti-korupsi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan memperkuat reputasi perusahaan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi antara kebijakan yang diungkapkan dan implementasinya, serta dukungan lingkungan institusional yang mampu menjamin kredibilitas dan akuntabilitas praktik tersebut.

Area Penelitian

Tabel 3. Distribusi frekuensi artikel berdasarkan bidang penelitian (*Research Area*)

Bidang Penelitian	Jumlah Artikel	Persentase
Penentu Pengungkapan Anti-Korupsi	36	80%
Konsekuensi Ekonomi dari Pengungkapan Anti-Korupsi	9	20%
Total	45	100%

Sumber: Analisis artikel, 2026

Penentu Pengungkapan Anti-Korupsi

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, penelitian mengenai pengungkapan anti-korupsi dalam satu dekade terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Berbagai studi empiris telah dilakukan untuk mengidentifikasi determinan yang memengaruhi tingkat pengungkapan anti-korupsi perusahaan, baik yang berasal dari karakteristik internal organisasi maupun dari tekanan lingkungan eksternal. Namun demikian, hasil penelitian yang diperoleh cenderung bervariasi dan dalam beberapa kasus menunjukkan temuan yang tidak konsisten antar penelitian. Berdasarkan analisis mendalam terhadap 45 artikel yang menjadi sampel dalam studi ini, penulis kemudian melakukan proses sintesis terhadap berbagai variabel yang digunakan dalam masing-masing penelitian. Meskipun setiap artikel menguji variabel yang berbeda-beda, hasil pemetaan menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori utama yang merepresentasikan faktor-faktor yang memengaruhi praktik pengungkapan anti-korupsi perusahaan. Kelima kategori tersebut meliputi (1) *corporate characteristics*; (2) *corporate governance*; (3) *informal characteristics*; (4) *stakeholder pressures*; serta (5) *regional/regulatory*.

Terkait dengan karakteristik perusahaan, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan dalam *United Nations Global Compact (UNGC)*, *cross-listing*, serta status sebagai perusahaan multinasional memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan anti-korupsi yang lebih tinggi. Branco et al. (2019) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki status multinasional, *cross-listing*, dan menjadi anggota UNGC memiliki kecenderungan lebih besar untuk melaporkan informasi terkait upaya anti-korupsi, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Turki. Temuan serupa juga disampaikan oleh Duho et al. (2023), yang menunjukkan bahwa keanggotaan UNGC dan status multinasional berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan anti-korupsi pada sampel 27 perusahaan di sektor ekstraktif di Afrika. Selain itu, Vale dan Branco (2019) mengungkapkan bahwa perusahaan yang beroperasi di beberapa negara serta keanggotaan dalam UNGC dapat menjadi indikator penting dalam memprediksi tingkat pengungkapan anti-korupsi pada perusahaan multinasional dari negara berkembang. Sementara itu, dalam konteks Indonesia, Faisal et al. (2022) menemukan bahwa ukuran perusahaan juga berperan sebagai faktor yang mendorong perusahaan publik untuk mengungkapkan informasi terkait praktik anti-korupsi.

Terkait dengan aspek tata kelola perusahaan, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* memiliki peran penting dalam mendorong pengungkapan anti-

korupsi. Berbagai studi menemukan bahwa independensi dewan berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan anti-korupsi (misalnya Ghazwani et al., 2023; Previtali dan Cerchiello, 2023; Jaggi et al., 2021). Selain itu, Barros et al. (2022) melaporkan adanya hubungan positif antara koneksi politik dan pengungkapan anti-korupsi di Brasil, di mana perusahaan yang memiliki keterkaitan politik cenderung meningkatkan transparansi sebagai upaya memperoleh kembali legitimasi setelah terungkapnya skandal korupsi perusahaan. Lebih lanjut, keberagaman gender dalam dewan juga terbukti menjadi faktor yang mendorong praktik pengungkapan tersebut. Ghazwani et al. (2023) serta Previtali dan Cerchiello (2023) menemukan bahwa keberagaman gender dalam dewan direksi berhubungan positif dengan pengungkapan anti-korupsi pada perusahaan di Inggris dan Italia. Sejalan dengan hal tersebut, Al-Okaily (2023) menunjukkan bahwa tingginya proporsi direktur perempuan dalam dewan mampu mengurangi dampak negatif kepemilikan keluarga terhadap pelaporan anti-korupsi di Inggris. Struktur kepemilikan juga diidentifikasi sebagai faktor yang berpotensi memengaruhi praktik pengungkapan anti-korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan asing dan ketergantungan pada tender pemerintah memiliki hubungan positif dengan tingkat pengungkapan anti-korupsi di empat negara ASEAN, yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Sebaliknya, kepemilikan negara berhubungan negatif dengan pengungkapan anti-korupsi di Indonesia (Faisal et al., 2022). Selain itu, Utami dan Barokah (2024) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan pemerintah yang lebih tinggi, diaudit oleh auditor berkualitas tinggi, serta beroperasi di negara dengan jumlah akuntan profesional yang lebih banyak cenderung memiliki pengungkapan anti-korupsi yang lebih transparan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas auditor dan kompetensi akuntansi di tingkat negara merupakan prediktor yang konsisten dalam mendorong praktik pengungkapan anti-korupsi.

Terkait dengan karakteristik informal, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap pengungkapan anti-korupsi perusahaan. Masud et al. (2024) menunjukkan bahwa prinsip syariah memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengungkapan anti-korupsi pada sektor perbankan di Bangladesh dan cenderung melemah pada bank-bank yang diaudit oleh auditor dari kelompok *Big Four*. Nobanee et al. (2020) juga menemukan bahwa pengungkapan anti-korupsi berdampak negatif terhadap kinerja perbankan di Uni Emirat Arab, termasuk bank syariah. Hal ini diduga akibat lemahnya praktik pengungkapan serta rendahnya pemahaman pasar sehingga informasi tersebut belum dianggap sebagai risiko material yang signifikan. Selain itu, Blanc et al. (2019) menelaah karakteristik institusi informal yang berkaitan dengan tingkat kerahasiaan (*secrecy*), yang diukur melalui kombinasi dimensi budaya seperti penghindaran ketidakpastian, jarak kekuasaan, dan individualisme, dimana negara dengan tingkat kerahasiaan budaya yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat pengungkapan anti-korupsi yang lebih rendah secara signifikan.

Tekanan pemangku kepentingan semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Paparan media (Blanc et al., 2017) dan tingkat kebebasan pers (Blanc et al., 2017; Odriozol & Etxeberria, 2021), umumnya berkorelasi positif dengan pengungkapan anti-korupsi. Sorotan publik yang tinggi mendorong perusahaan untuk semakin memperkuat legitimasi melalui peningkatan transparansi kebijakan dan prosedur anti-korupsi.

Berbagai regulasi telah diberlakukan di tingkat global untuk mendorong transparansi perusahaan dalam melaporkan praktik anti-korupsi. Beberapa di antaranya adalah standar *Global Reporting Initiative (GRI) 205: Anti-Corruption* yang diterbitkan oleh *Global Sustainability Standards Board* pada tahun 2016 serta *UK Bribery Act 2010*. Penelitian yang dilakukan oleh Islam et al. (2021) menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya *UK Bribery Act 2010*, terjadi peningkatan yang signifikan dalam praktik pelaporan anti-korupsi, baik melalui laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan perusahaan. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Ghazwani et al. (2023) yang menganalisis perkembangan praktik pengungkapan anti-korupsi pada 100 perusahaan besar di sektor ekstraktif yang terdaftar di Inggris selama periode 2003–2019. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan anti-korupsi mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah implementasi undang-undang tersebut. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Ghazwani et al. (2025) yang menunjukkan bahwa penerapan *UK Bribery Act 2010* mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan sebagai bentuk akuntabilitas yang mencerminkan respons perusahaan terhadap tekanan eksternal guna memperkuat legitimasi

operasionalnya di pasar.

Konsekuensi Ekonomi dari Pengungkapan Anti-Korupsi

Dari perspektif konsekuensi ekonomi, peningkatan pengungkapan terkait korupsi tidak selalu memberikan dampak yang sepenuhnya positif. Asare et al. (2021) menunjukkan bahwa pengungkapan tersebut dapat menekan profitabilitas perusahaan karena sering dipersepsikan sebagai informasi negatif, yang berpotensi menurunkan pendapatan sekaligus meningkatkan biaya. Di sisi lain, sejumlah penelitian menemukan bahwa pengungkapan anti-korupsi memiliki hubungan negatif dengan praktik manajemen laba (Elmaghrabi & Diab, 2023; Salem et al., 2023). Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang lebih transparan cenderung memiliki tingkat manipulasi laba yang lebih rendah, khususnya pada perusahaan dengan kondisi laba yang cenderung *overvalued* serta didukung oleh efektivitas peran komite audit. Sebaliknya, rendahnya tingkat pengungkapan justru dapat membuka peluang lebih besar terjadinya praktik manajemen laba. Kondisi ini bahkan ditemukan lebih kuat pada perusahaan yang memiliki representasi perempuan yang lebih rendah dalam komite audit (Ratu & Rahajeng, 2024). Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Ghitagia (2015), yang menemukan bahwa tingkat pengungkapan anti-korupsi yang rendah masih banyak dijumpai pada perusahaan di kawasan Afrika Timur, serta terdapat hubungan negatif antara pengungkapan anti-korupsi dan praktik manajemen laba pada perusahaan-perusahaan tersebut.

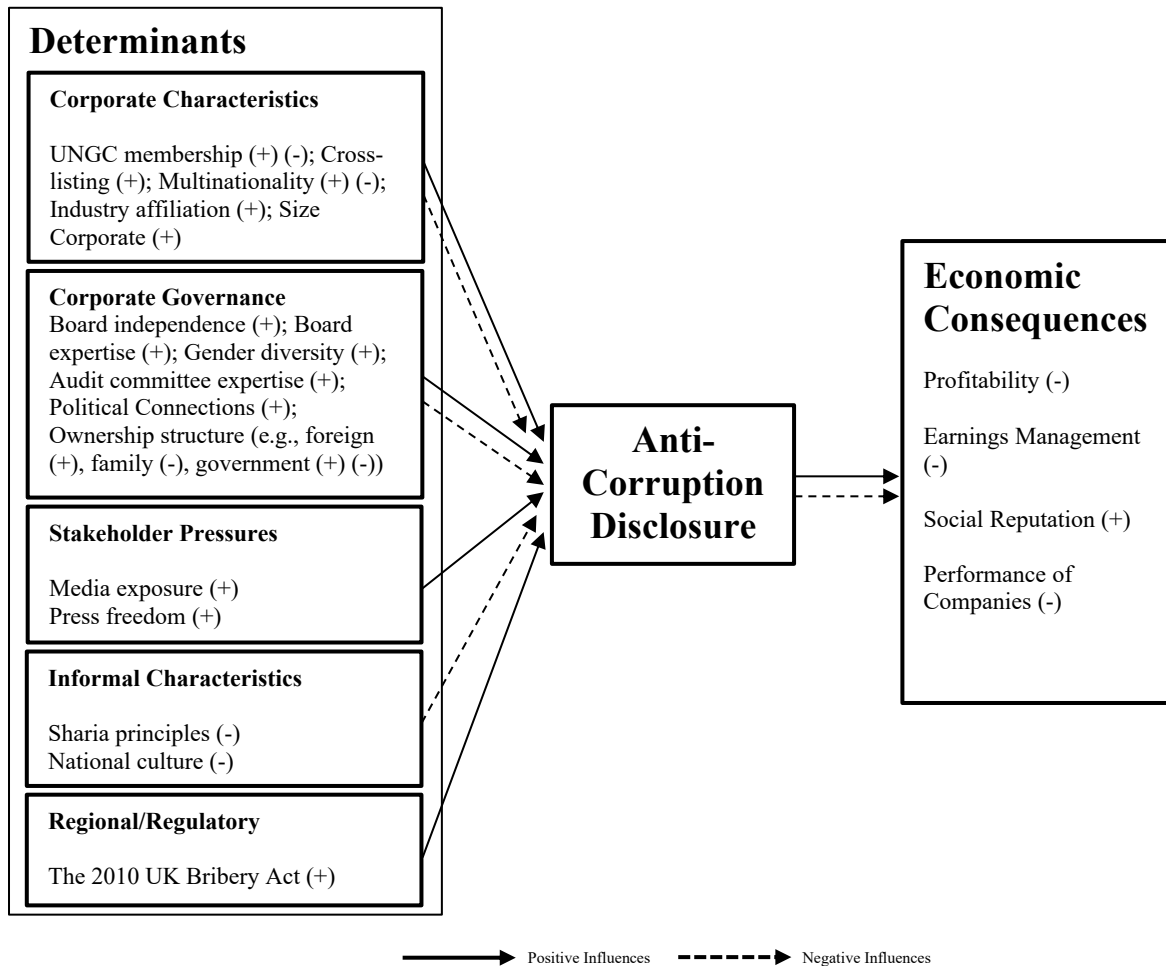
Namun demikian, dampak pengungkapan tidak hanya dapat dilihat dari sisi kinerja keuangan jangka pendek. Aldaz et al. (2015) berpendapat bahwa transparansi, meskipun berpotensi menekan profitabilitas dalam jangka pendek, justru dapat memberikan manfaat jangka panjang melalui peningkatan reputasi sosial perusahaan. Perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap kepentingan publik cenderung memperoleh keunggulan kompetitif, salah satunya melalui peningkatan citra positif yang dikenal sebagai *green goodwill*. Lebih lanjut, temuan empiris lainnya juga mendukung adanya manfaat non-keuangan dari pengungkapan anti-korupsi. Gerged et al. (2024) menemukan adanya hubungan positif antara pengungkapan anti-korupsi dan kinerja keberlanjutan pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks FTSE 350 di Inggris. Sejalan dengan itu, Etxeberria & Odriozola (2017) menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan reputasi sosial perusahaan, khususnya dalam konteks anti-korupsi pada perusahaan-perusahaan besar di Eropa.

Evaluasi Kritis Terhadap Area Penelitian dari Pengungkapan Anti-Korupsi

Kajian mengenai determinan dan konsekuensi ekonomi pengungkapan anti-korupsi masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar yang menunjukkan keterbatasan serius dalam pengembangan literatur ini. Pertama, indikator yang digunakan untuk mengukur pengungkapan anti-korupsi dinilai belum sepenuhnya mampu merepresentasikan keseluruhan praktik yang ada. Sebagian besar penelitian hanya mengandalkan informasi yang tersedia dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang pada dasarnya bersifat *self-reported* dan berpotensi bias. Selain itu, pengukuran yang digunakan sering merujuk pada indikator dalam GRI 205: *Anti-corruption* yang diterbitkan oleh *Global Reporting Initiative* (2016) yang meliputi: (i) identifikasi operasi yang berisiko terhadap korupsi, (ii) pengungkapan serta pelatihan terkait kebijakan dan prosedur anti-korupsi, serta (iii) insiden korupsi dan tindak lanjut yang dilakukan. Meskipun demikian, cakupan indikator tersebut masih dianggap belum seluas ukuran yang dikembangkan oleh *Transparency International* (Al-okaily, 2023; Previtali & Cerchiello, 2023).

Kedua, dari sisi metodologis, beberapa penelitian belum secara memadai menangani persoalan kausalitas yang kompleks, khususnya terkait potensi hubungan timbal balik antar variabel. Misalnya, penggunaan variabel *dummy* seperti keahlian dewan, koneksi politik, struktur kepemilikan, maupun keterlibatan dalam inisiatif global untuk menjelaskan variasi pengungkapan sering kali tidak disertai pengendalian terhadap potensi *self-selection bias* dalam proses pemilihan sampel (Barros et al., 2022; Masud & Rahman, 2022; Previtali & Cerchiello, 2023; Sari et al., 2020). Di samping itu, risiko bias akibat variabel yang tidak dimasukkan dalam model juga kerap diabaikan, sehingga berpotensi memengaruhi keandalan dan validitas hasil penelitian (Asare et al., 2021; Elmaghrabi & Diab, 2024; Nobanee et al., 2020; Previtali & Cerchiello, 2023).

Ketiga, penggunaan sampel perusahaan multinasional juga menghadirkan tantangan tersendiri karena adanya perbedaan karakteristik lintas negara dan industri. Variasi dalam sistem regulasi, tingkat pengawasan, serta sanksi terkait korupsi dapat memengaruhi praktik pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Di samping itu, perbedaan sektor industri turut menentukan tingkat paparan risiko korupsi yang dihadapi masing-masing perusahaan yang pada akhirnya dapat memengaruhi hasil analisis (Blanc et al., 2018; Branco & Matos, 2016).



Gambar 2. Peta Pengaruh Pengungkapan Anti-korupsi
Sumber: Gambar disusun oleh penulis, 2026

KESIMPULAN

Penelitian ini merupakan *systematic literature review* (SLR) yang bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif perkembangan literatur mengenai pengungkapan anti-korupsi. Dengan menggunakan pendekatan PRISMA, penelitian ini menganalisis 45 artikel terindeks Scopus yang dipublikasikan pada periode 2015–2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa penelitian terkait pengungkapan anti-korupsi berkembang dalam dua area utama, yaitu determinan dan konsekuensi ekonomi, yang selanjutnya dapat dipetakan ke dalam tiga dimensi utama. Dimensi tersebut meliputi peran pengungkapan dalam memperkuat tata kelola perusahaan, fungsinya dalam mitigasi risiko *fraud* dan korupsi, serta kontribusinya dalam meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan reputasi perusahaan. Temuan ini menegaskan bahwa pengungkapan anti-korupsi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga strategis dalam mendukung integritas dan keberlanjutan perusahaan. Penulis juga mengidentifikasi tiga kritik utama mengenai topik ini. Pertama, pengukuran pengungkapan yang digunakan dalam berbagai studi cenderung bersifat prosedural dan belum mampu merefleksikan praktik substantif secara menyeluruh. Kedua, terdapat kelemahan metodologis yang berkaitan dengan potensi masalah kausalitas serta bias dalam model empiris yang digunakan. Ketiga, tingginya heterogenitas sampel, khususnya pada perusahaan multinasional,

berpotensi memengaruhi validitas serta generalisasi temuan penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa kajian di bidang pengungkapan anti-korupsi masih memerlukan penguatan yang lebih mendalam, baik dari sisi konseptual maupun metodologis.

Penelitian ini memberikan sejumlah implikasi penting. Bagi peneliti, studi ini menyajikan sintesis literatur terkini sekaligus mengidentifikasi celah penelitian yang masih terbuka, khususnya terkait area dan konteks yang masih belum banyak diteliti. Bagi pembuat kebijakan, hasil kajian ini menunjukkan bahwa pengungkapan anti-korupsi dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas, sehingga diperlukan dukungan regulasi dan penguatan institusi untuk meningkatkan kualitas pelaporan, terutama di negara dengan tingkat pengungkapan yang masih rendah. Bagi investor, temuan ini mengindikasikan bahwa pengungkapan anti-korupsi dapat dijadikan sebagai sinyal penting dalam menilai kualitas tata kelola perusahaan serta komitmen manajemen terhadap praktik bisnis yang etis.

Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya keterbatasan dalam literatur yang ada, sehingga membuka peluang bagi penelitian selanjutnya. Studi mendatang disarankan untuk memperdalam analisis pada negara dengan tingkat korupsi yang tinggi dibandingkan dengan negara maju guna memahami perbedaan konteks institusional. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana regulasi dan norma institusional memberikan tekanan yang berbeda terhadap perusahaan dalam melakukan pengungkapan sukarela. Penelitian selanjutnya juga perlu memperluas kajian mengenai konsekuensi ekonomi pengungkapan anti-korupsi, tidak hanya terbatas pada profitabilitas, manajemen laba, reputasi sosial, dan kinerja perusahaan, tetapi juga mencakup aspek perilaku manajerial, seperti kompensasi CEO, pergantian CEO, serta pengambilan keputusan investasi. Dengan demikian, penelitian di masa depan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai peran strategis pengungkapan anti-korupsi dalam konteks global.

Terakhir, penelitian ini tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan. Pertama, penggunaan kata kunci dalam proses pencarian masih relatif terbatas, sehingga berpotensi belum menangkap seluruh literatur yang relevan. Kedua, studi ini hanya memfokuskan pada artikel yang telah melalui proses *peer-review*, sehingga tidak mencakup publikasi lain seperti prosiding konferensi atau seminar yang mungkin juga memuat temuan penting lainnya. Selain itu, penggunaan basis data Scopus sebagai satu-satunya sumber literatur berpotensi menimbulkan *database bias* karena cakupan indeksasinya tidak sepenuhnya merepresentasikan seluruh publikasi ilmiah yang tersedia secara global. Di samping itu, keterbatasan ini juga dapat memunculkan *regional bias*, mengingat publikasi yang terindeks dalam Scopus cenderung didominasi oleh negara atau wilayah tertentu, sehingga representasi konteks dari negara berkembang atau kawasan tertentu menjadi kurang optimal. Studi ini tidak hanya memberikan gambaran perkembangan penelitian sejak awal kemunculannya pada tahun 2015 hingga 2026, tetapi juga memberikan evaluasi serta arahan bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

REFERENSI

- Al-okaily, J. (2023). Family Control and Corporate Anti-Corruption Disclosures: The Moderating Effect of Female Directors. *Meditari Accountancy Research*, 424–451. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-01-2022-1573>
- Aldaz, M., Alvarez, I., & Calvo, J. A. (2015). Non-financial Reports, Anti-corruption Performance And Corporate Reputation. *Review of Business Management*, 17(58), 1321–1340. <https://doi.org/10.7819/rbgn.v17i58.2687>
- Asare, E. T., Carl, K., Duho, T., Agyenim-boateng, C., & Onumah, J. M. (2021). Anti-Corruption Disclosure As A Necessary Evil: Impact On Profitability And Stability of Extractive Firms in Africa. *Journal of Financial Crime*, 28(2), 531–547. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2020-0173>
- Ayman, I., & Alleyne, A. (2018). Corporate Disclosure On Anti-Corruption Practice A Study of Social Responsible Companies in the Gulf Cooperation Council. *Journal of Financial Crime*, 25(4), 1077–1093. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2017-0045>
- Barkemeyer, R., Preuss, L., & Lee, L. (2015). Corporate Reporting On Corruption: An International Comparison. *Accounting Forum*, 39(4), 349–365. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2015.10.001>

- Barros, A., dos Santos, M. R. L., Melo, I., dos Santos, M., & da Silva, S. . (2022). Are Politically Connected Firms in Brazil Worried About Anti-Corruption Disclosure? *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 12(2), 300–317. <https://doi.org/10.1108/JAEE-05-2020-0118>
- Blanc, R., Islam, M. A., Patten, D. ., & Branco, M. C. (2017). Corporate Anti-Corruption Disclosure: An Examination Of The Impact Of Media Exposure And Country-Level Press Freedom. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-02-2015-1965>
- Branco, M. C., & Matos, D. (2016). The Fight Against Corruption in Portugal: Evidence From Sustainability Reports. *Journal of Financial Crime*, 23(1), 132–142. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2014-0027>
- Brusca, I., Rossi, F. M., & Aversano, N. (2018). Accountability and Transparency to Fight against Corruption: An International Comparative Analysis. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 20(5), 486–504. <https://doi.org/10.1080/13876988.2017.1393951>
- Deegan, C. (2007). Organizational Legitimacy As A Motive For Sustainability Reporting. *Sustainability Accounting and Accountability*, 127–149.
- Duho, K. C. T., Agyenim-Boateng, C., Asare, E. T., & Onumah, J. M. (2023). Convergence And Determinants Of Anti-Corruption Disclosure Among Extractive Firms in Africa. *Journal of Financial Crime*, 30(4), 908–926. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2020-0109>
- Etxeberria, I. Á., & Odriozola, M. A. (2017). The Social Reputation Of European Companies: Does Anti-corruption Disclosure Affect Stakeholder's Perceptions. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 1–8. <https://doi.org/10.1002/csr.1488>
- Faisal, F., Joseph, C., Saputri, A., & Prastiwi, A. (2022). The Content And Determinants of CSR Anti-Corruption Disclosure: The Case of Public-Listed Companies in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 890–907. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0155>
- Gerged, A. M., Salem, R., & Ghazwani, M. (2024). Corporate Anti-Corruption Disclosure and Corporate Sustainability Performance in the United Kingdom: Does Sustainability Governance Matter? *Business Strategy and the Environment*, 2589–2606. <https://doi.org/10.1002/bse.4108>
- Ghazwani, M., Alamir, I., Salem, R. I. A., & Sawan, N. (2024). Anti-corruption disclosure and corporate governance mechanisms: insights from FTSE 100. *International Journal of Accounting & Information Management*, 32(2), 279–307. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-08-2023-0211>
- Githaiga, P. N. (2024). Corporate Anti-Corruption Disclosure and Earnings Management: The Moderating Role of Board Gender Diversity. *Corporate Governance: Bingley*, 25(3), 684–703. <https://doi.org/10.1108/CG-02-2024-0100>
- GRI. (2022). *GRI 205: Antikorupsi 2016*. <https://globalreporting.org/pdf.ashx?id=14368&page=8>
- Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2005). The Impact of Culture And Governance On Corporate Social Reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24, 391–430. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2005.06.001>
- Hess, D. (2009). Catalyzing Corporate Commitment to Combating Corruption. *Journal of Business Ethics*, 781–790. <https://doi.org/10.1007/s10551-009-0322-7>
- Islam, M. A., Dissanayake, T., Dellaportas, S., & Haque, S. (2018). Anti-Bribery Disclosures: A Response to Networked Governance. *Accounting Forum*, 42(1), 3–16. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2016.03.002>
- Islam, M. A., Haque, S., Henderson, S., Jones, M. J., & Semeen, H. (2021). Corporate Disclosures on Curbing Bribery and the UK Bribery Act 2010: Evidence from UK Companies. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 34(8), 1851–1882. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2019-4017>
- Jaggi, B., Allini, A., Ginesti, G., & Macchioni, R. (2021). Determinants Of Corporate Corruption Disclosures: Evidence Based On EU Listed Firms. *Meditari Accountancy Research*, 29(1), 21–38. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-11-2019-0616>
- Joseph, C., Gunawan, J., Sawani, Y., Rahmat, M., Avelind, J., & Darus, F. (2016). A Comparative Study Of Anti-Corruption Practice Disclosure Among Malaysian and Indonesian Corporate

- Social Responsibility (CSR) Best Practice Companies. *Journal of Cleaner Production*, 112, 2896–2906. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.10.091>
- Mantiri, M. D. K., & Eriandani, R. (2022). Corporate Governance Characteristics And Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 78–89.
- Masud, A. K., & Rahman, M. (2022). Anti-Corruption Disclosure, Corporate Social Expenditure and Political Corporate Social Responsibility: Empirical Evidence from Bangladesh. *Sustainability*, 14.
- Mawliidy, E. R., Primasatya, R. D., & Lorensa, L. (2024). Kemampuan Artificial Intelligence Terhadap Pendeteksian Fraud: Studi Literatur. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 89–104. <https://doi.org/10.1016/j.dsef.2024.100021>
- Nobanee, H., Atayah, O. F., & Mertzanis, C. (2020). Does Anti-Corruption Disclosure Affect Banking Performance? *Journal of Financial Crime*, 27(4), 1161–1172. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2020-0047>
- Odriozol, M. A., & Etxeberria, I. Á. (2021). Determinants of Corporate Anti-Corruption Disclosure: The Case of the Emerging Economics. *Sustainability*, 13, 3462. <https://doi.org/doi.org/10.3390/su13063462>
- Odriozola, M. A., Antonio, J., Sánchez, C., & Etxeberria, I. Á. (2012). Corruption Reporting Disclosure: Ibex 35 Companies. *Revista de Contabilidad*, 15(1), 59–90. [https://doi.org/10.1016/S1138-4891\(12\)70038-9](https://doi.org/10.1016/S1138-4891(12)70038-9)
- Ortas, E., Álvarez, I., & Garayar, A. (2015). The Environmental, Social, Governance, and Financial Performance Effects on Companies that Adopt the United Nations Global Compact. *Sustainability*, 7(2), 1932–1956. <https://doi.org/10.3390/su7021932>
- Previtali, P., & Cerchiello, P. (2023). Corporate Governance And Anti-Corruption Disclosure. *Corporate Governance: Bingley*, 23(6), 1217–1232. <https://doi.org/10.1108/CG-06-2022-0275>
- Sari, T. K., Cahaya, F. R., & Joseph, C. (2020). Coercive Pressures and Anti-Corruption Reporting: The Case of ASEAN Countries. *Journal of Business Ethics*. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04452-1>
- Utami, E. R., & Barokah, Z. (2024). The Determinants of Corporate Anti-Corruption Disclosures: Evidence From Construction Companies In The Asia-Pacific. *Corporate Governance: Bingley*, 24(6), 1414–1441. <https://doi.org/10.1108/CG-04-2023-0152>
- Vale, J., & Branco, M. C. (2019). Anti-Corruption Reporting In Emerging Country Multinationals. *Journal of Financial Crime*, 26(3), 861–873. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2018-0114>